

**DISCLOSURE INTELLECTUAL CAPITAL PADA
PERSPEKTIF KINERJA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

Atthariq Faishal Hairuddin
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
atthariqfaishal48@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) reveal the system for setting PNBP budget targets at UIN Walisongo in 2018 and the performance of intellectual capital owned by UIN Walisongo in setting PNBP budget targets in 2018, and (2) reveal the performance of intellectual capital owned by UIN Walisongo is seen from the realization and level of effectiveness of PNBP performance at UIN Walisongo using data from the 2018 PNBP report. This study uses a qualitative descriptive analysis method and analysis of effectiveness which describes, describes, and compares a data or situation in such a way that a conclusion can then be drawn. The results of the study show that the performance of intellectual capital is good, starting from target setting to realization and calculating the level of effectiveness, as a whole it is included in the good and effective category, and of course further innovation and refinement is needed so that it can carry out PNBP management with even better performance.

Keywords: Intellectual Capital, Non-Tax State Revenue, UIN Walisongo

Keywords: *Intellectual Capital, Non-Tax State Revenue, UIN Walisongo*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengungkap sistem penetapan target anggaran PNBP di UIN Walisongo pada tahun 2018 dan kinerja modal intelektual yang dimiliki oleh UIN Walisongo dalam menetapkan target anggaran PNBP di tahun 2018 tersebut, serta (2) mengungkap kinerja modal intelektual yang dimiliki oleh UIN Walisongo dilihat dari realisasi dan tingkat efektivitas kinerja PNBP di UIN Walisongo dengan menggunakan data laporan PNBP tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan analisis efektivitas yang sifatnya menggambarkan, menguraikan, dan membandingkan suatu data atau keadaan sedemikian rupa yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja modal intelektual baik itu mulai dari penetapan target hingga realisasi serta perhitungan tingkat efektivitasnya, secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan efektif, dan tentunya diperlukan inovasi dan penyempurnaan lagi agar dapat melaksanakan pengelolaan PNBP dengan kinerja yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: *Modal Intelektual, Penerimaan Negara Bukan Pajak, UIN Walisongo*

Pendahuluan

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang bersih berarti suatu pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati-hatian. Oleh karena itu dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) organisasi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas yang merupakan pondasi dari proses pemerintahan. Salah satu upaya nyata yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Winastiti, 2019).

Disahkannya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Pemerintah, telah menjadikan sebuah lembaga pendidikan harus dikelola seperti sebuah industri perusahaan, dimana optimalisasi pengelolaan manajemen di berbagai bidang harus dilakukan dengan optimal agar tercapai *Good University Governance* (GUG) yang baik yang mana diawali dengan kualitas internal yang baik, salah satunya dalam melaporkan laporan keuangan yang ada di universitas, yang mana laporan keuangan yang baik dapat dicontoh sebagaimana laporan keuangan perusahaan yang *go public*. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi (Winastiti, 2019). Pengungkapan sukarela bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Anggaran sektor publik diciptakan dengan tujuan menentukan kebutuhan masyarakat secara luas, mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Anggaran sangat diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sedangkan sumber pendapatannya terbatas, sehingga pemerintah harus merencanakan tujuan yang akan dicapai. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif, maka perlu memperhatikan partisipasi dalam penyusunan anggaran atau penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif merupakan salah satu bentuk kegiatan penetapan target anggaran yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai otoritas termasuk karyawan sebagai bawahan pihak otoritas tersebut dalam menyusun anggaran organisasi serta dapat mengevaluasi dan mempersiapkan berbagai alternatif serta tujuan anggaran tersebut.

Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Kemudian karakteristik kinerja penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Sebagai satuan kerja, perguruan tinggi menerima berjenis-jenis pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal penerimaan tertentu dan jumlahnya kadang-kadang tidak dapat diperkirakan. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintahan yang menggunakan PNBP sebagai salah satu anggaran yang digunakan dalam merealisasikan perencanaan perekonomian instansi pemerintahan tersebut, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan

mandiri memiliki kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang (Rittiau, 2019).

Efektivitas penerimaan negara bukan pajak memegang peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Nursanti, Mas'ud, & Alam, 2019). Peningkatan efektivitas penerimaan negara bukan pajak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan atau pemanfaatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBPN yang berkelanjutan sesuai perkembangan ekonomi makro, sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan PNBPN tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen berlandaskan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik (Nursanti, Mas'ud, & Alam, 2019).

Dewasa ini, penelitian mengenai pengungkapan dan pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja suatu perusahaan atau instansi makin banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian menurut Arsyati Darwanis, dan Muslim yang meneliti kualitas Intellectual Capital yang dimiliki terhadap kualitas PNBPN dalam upaya meningkatkan kerja instansi pada Universitas Syiah Kuala, hasil penelitian ini menyatakan Kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan PNBPN mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pada Unsyiah. Afriningtiyas Widyaningsih juga meneliti pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan, hasil yang didapatkan adalah Intellectual Capital (IC) dan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Lalu ada Muhammad Rivandi yang penelitiannya menyatakan Disclosure Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai perusahaan. Selain penelitian-penelitian tersebut terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa Intellectual Capital (IC) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu penelitian oleh Denny Andriana yang menyatakan bahwa Intellectual Capital dan Human Capital berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Disclosure Intellectual Capital

Disclosure Intellectual Capital adalah kegiatan mengungkap kinerja Intellectual Capital pada suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh standar operasional di setiap perusahaan atau instansi pemerintahan, dengan tujuan membantu mencegah dan memperbaiki beberapa kesalahan yang ditemukan saat evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan sejenisnya dalam setiap aspek kegiatannya. PNBPN Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal 1 Angka 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN diantaranya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya (Dewi, 2011).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem pengendalian dan pengaturan suatu perusahaan yang bisa dilihat dari mekanisme hubungan diantara pihak-pihak yang mengelola suatu perusahaan (hard definition), ataupun dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam mekanisme pengelolaan tersebut (soft definition) (Ferlinda, Ribawanto, & Siswidiyanto).

Good University Governance (GUG)

Good University Governance (GUG) merupakan suatu konsep tata hubungan antara manajemen yang berdasarkan hukum, peraturan, kaidah-kaidah universitas agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, baik itu dalam pengembangan pendidikan, keilmuan akademik, dan pengembangan manusia seutuhnya.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian jenis kualitatif yang dijadikan metode penelitian dan menciptakan berupa data yang bersifat deskriptif yang berisi lisan ataupun kata-kata yang tertulis dari seseorang serta perbuatan yang seeable (Moleong, 2003). Selaras berdasarkan data yang si peneliti perlukan, pastinya bisa tepat jika metode jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh si peneliti. Disebabkan data-data yang diperlukan dalam hal ini merupakan susunan kata-kata yang disajikan tidak dalam susunan angka maupun perhitungan. Riset ini dilaksanakan peneliti guna mengungkap Intellectual Capital dilihat dari perspektif PNB pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ruang lingkup adalah sebuah batasan yang diberikan dalam penelitian, bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dari tujuan penelitian awal yang ingin dilakukan dan tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan dalam melakukan penelitian tersebut (Fatimah, 2020). Ruang lingkup pada penelitian ini adalah audit anggaran di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berpusat pada pengungkapan target dan realisasi serta perhitungan tingkat efektivitas PNBPNya.

Jenis data dalam riset ini bisa digolongkan menjadi dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama ataupun data pokok yang dipakai dalam riset yang diperoleh dari tangan pertama subjek penelitian (Unknown, 2020). Sumber data primer yang penulis gunakan adalah wawancara dengan dosen dan staff satuan pengawas internal (SPI) serta berkunjung langsung ke kantor satuan pengawas internal (SPI) di UIN Walisongo Semarang untuk melihat langsung pencatatan dan pengelolaan anggaran yang didapat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam hal ini menyangkut pula bagaimana Intellectual Capital bekerja dalam pencatatan dan pengelolaan tersebut. Peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil wawancara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data sebagai pelengkap sang data primer, dan didapatkan bukan dari tangan pertama namun dari tangan kedua dan tangan ketiga serta begitu seterusnya (Unknown, 2020). Sumber data sekunder sebagai pendukung diantaranya yaitu data laporan keuangan UIN Walisongo, berbagai buku tentang Intellectual Capital, dan kajian-kajian ilmiah tentang Intellectual Capital, serta riset-riset terdahulu yang mengkaji permasalahan tentang pengupahan pada pekerja

atau buruh. Selain itu peneliti juga memakai beberapa sumber lain, yakni buku dan artikel terkait.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dan anggaran keuangan penerimaan negara bukan pajak di UIN Walisongo Semarang tahun 2018.

4. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) tentang suatu masalah yang akan diteliti, di mana pewawancara bermaksud untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti (Gunawan, 2015).

Obyek wawancara pada penelitian ini adalah Bapak Setyo Budi Hartono, M.Si selaku Dosen Febi yang pernah menjabat juga sebagai Koordinator Bagian Keuangan dan Perencanaan di Satuan Pengawas Internal di tahun 2018 dan Bapak Warno, SE, M.Si selaku Dosen Febi yang juga pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang SDM dan Organisasi Satuan Pengawas Internal ditahun 2018.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari kegiatan wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Sugiyono, 2011).

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari catatan yang diperoleh di lapangan. Pada proses pemilihan, penulis memilih data yang akan digunakan dan data yang tidak digunakan

c. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data/menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data yang disajikan akan semakin mudah untuk dibaca dan dipahami. Penyajian data akan dilengkapi dengan tabel guna menyederhanakan informasi yang kompleks serta menggabungkan informasi yang tersusun menjadi bentuk yang padu, sehingga akan mudah untuk dipahami mengenai Disclosure Intellectual Capital Pada Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

d. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion and Vervication)

Setelah menyajikan semua data, tahap selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara, dimana dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian data maka penulis akan melakukan analisis kembali dan di dukung data-data tambahan yang diperoleh dan akan merumuskan kesimpulan kembali.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penetapan Anggaran PNBP di UIN Walisongo Semarang

Dari hasil wawancara dengan dosen dan staff pengawas internal UIN Walisongo, sistem penetapan target anggaran PNPB di UIN Walisongo menggunakan sistem penetapan anggaran secara partisipatif, dikarenakan dalam penetapan anggaran, karyawan, staff, dan dosen sebagai SDM pelaksana ikut terlibat dalam penetapan anggaran tersebut. Di UIN Walisongo penetapan target anggaran awal untuk keseluruhan layanan yang dimiliki oleh UIN Walisongo dilakukan oleh pihak rektorat sebagai otoritas teratas. Hasil penetapan target yang telah ditetapkan kemudian diberikan kepada 18 unit departemen yang dimiliki oleh UIN Walisongo termasuk fakultas pendidikan perkuliahan untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen dan fakultas di UIN Walisongo (Warno, 2020).

Penetapan anggaran secara partisipatif yang dilakukan oleh UIN Walisongo didasari dari situasi UIN Walisongo yang memiliki bermacam-macam departemen yang melakukan kegiatan yang berbeda-beda, sehingga rektorat sebagai otoritas tertinggi hanya dapat memprediksi target penetapan secara general saja, sisanya dalam penetapan anggaran tersebut akan di kembalikan kepada masing-masing departemen untuk menetapkan target anggaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, penetapan anggaran tersebut kemudian dibuat oleh kepala masing-masing departemen bersama dengan bawahannya, dalam hal ini karyawan, staff, dan dosen (Intellectual Capital), sehingga dapat menghasilkan rancangan target anggaran yang spesifik dan akurat.

Rancangan yang spesifik dan akurat akan berdampak kepada Intellectual Capital sebagai bawahan dan pelaksana langsung dalam merealisasikan target tersebut akan menjadi bertanggung jawab dan mengerjakan kegiatannya secara 100%

kemampuannya, agar target tersebut dapat direalisasikan sepenuhnya, atau bahkan dapat melampauinya, tentunya dengan pengawasan yang kooperatif juga. Hal ini menandakan bahwa UIN Walisongo telah menerapkan tata kelola universitas yang baik, dengan adanya pengungkapan dan transparansi terhadap bagaimana pelaksanaan penetapan target yang partisipatif yang tentunya membuat universitas mampu dalam mengatur segala urusan dan kegiatannya (Warno, 2020).

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Intellectual Capital memiliki peran penting dalam menetapkan target anggaran PNBPN di UIN Walisongo Semarang. Karyawan, staff, dan dosen sebagai SDM yang terdapat dalam 18 departemen di UIN Walisongo menetapkan target dengan melihat kebutuhan tiap departemennya. Target anggaran yang dibuat harus bersifat spesifik, atau dalam artian harus secara rinci dan mendetail sehingga dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai di tiap-tiap departemen UIN Walisongo Semarang. Target tersebut kemudian harus disusun dan dicantumkan berupa angka, volume, rupiah, dan persentase agar tercipta sebuah rancangan anggaran PNBPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hartono, 2020). Dalam menentukan target PNBPN dari masing masing departemen, SDM selaku pelaksana didukung dengan kemampuan kognitif yang mumpuni dan akuntabilitas yang terjamin (Hartono, 2020).

Kemampuan Kognitif (Kognitif Ability)

Dari penetapan target yang telah dilakukan, kemampuan kognitif yang dimiliki oleh Intellectual Capital di UIN Walisongo Semarang dapat dikatakan sudah sangat baik, dimana dalam penetapan target anggaran PNBPN di tahun 2018 tersebut, telah dibuat dengan analisa yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing departemen yang menetapkan target anggaran

PNBP di UIN Walisongo, sehingga target anggaran tersebut dinilai sudah kooperatif dan dapat di realisasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing departemen dan jasa layanannya (Hartono, 2020).

Akuntabilitas

Akuntabilitas di UIN Walisongo Semarang dapat dikatakan sudah sangat baik, dimana di setiap kegiatan sudah ada pelaporannya secara terperinci, terlebih sekarang menggunakan sistem PNBP terpusat yang di setiap kegiatannya pasti ada data keuangan dan juga pelaporannya oleh Intellectual Capital yang dimiliki. Selain itu, di setiap 3 bulan akan ada evaluasi mengenai pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan oleh Intellectual Capital di tiap departemen yang dimiliki oleh UIN Walisongo (Hartono, 2020). Dari pertimbangan secara keseluruhan mulai dari penetapan target di tiap departemennya oleh Intellectual Capital yang dimiliki, maka dapat dipublikasikan bahwa kinerja Intellectual Capital dalam menetapkan target PNBP UIN Walisongo di tahun 2018 sudah sangat baik dan dapat dikatakan mampu untuk direalisasikan.

Tabel 1. Target PNBP UIN Walisongo 2018

No	Jenis Layanan	Target PNBP 2018
1	Jasa Layanan Kependidikan	Rp. 39.327.645.000
2	Jasa Layanan Non Kependidikan	Rp. 8.330.617.000
3	Jasa Layanan Perbankan dan Lainnya	Rp. 1.200.738.000
Total		Rp. 48.859.000.000

Sumber: Data disusun penulis

Tabel 2. Target PNBP UIN Walisongo Per Departemen

No	Departemen dan Fakultas	Target PNBP 2018
1	Fakultas Ushuludin dan Humaniora	Rp. 3.394.485.000
2	Fakultas Syariah dan Hukum	Rp. 4.439.806.250
3	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Rp. 4.257.250.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 3.549.587.500
5	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 3.437.750.000
6	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Rp. 1.352.531.250
7	Fakultas Sains dan Teknologi	Rp. 4.224.722.500
8	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Rp. 2.644.429.500
9	Pasca Sarjana UIN Walisongo	Rp. 5.774.500.000
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rp. 3.376.156.250
11	Akademik dan Kemahasiswaan	Rp. 1.292.568.750
12	Pusat Pengembangan Bahasa	Rp. 2.750.780.000
13	Pusat Pengembangan Bisnis	Rp. 3.039.625.000
14	Poliklinik	Rp. 1.580.820.000
15	Perpustakaan	RP. 747.500.000

16	Ma'had UIN Walisongo	Rp. 1.333.750.000
17	Kopertais UIN Walisongo	Rp. 462.000.000
18	Bagian Keuangan UIN Walisongo	Rp. 1.200.738.000
TOTAL		Rp. 48.859.000.000

Sumber: Data disusun penulis

Tabel diatas merupakan rekapitulasi total realisasi PNBP UIN Walisongo tahun 2018 per Departemen yang dihitung secara total keseluruhan realisasi perbulannya, peneliti mendapatkan hasil di mana realisasi pendapatan PNBP yang diterima oleh UIN Walisongo pada tahun 2018, dapat dikatakan sangat tinggi pendapatan PNBP UIN Walisongo yang diterima dari hasil uang spp/uang kuliah tunggal mahasiswa yang dibayarkan pada awal semester. Hal ini cukup lumrah, karena memang pendapatan utama PNBP di setiap perguruan tinggi memang berasal dari pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa, sehingga grafik realisasi penerimaan PNBP akan tinggi di setiap awal semester perkuliahan dimulai (Hartono, PNBP di Universitas, 2020).

Rekapitulasi total realisasi PNBP UIN Walisongo tahun 2018 pada Lampiran 2 Tabel 4.45. Pada tabel diatas terlampir realisasi PNBP di UIN Walisongo pada tahun 2018 mencapai RP. 76.946.297.423,20 yang terbagi menjadi tiga bagian jasa layanan yaitu jasa layanan kependidikan, jasa layanan non kependidikan dan jasa layanan perbankan dan lainnya.

Tingkat Efektivitas Kebijakan Kinerja PNBP di UIN
Walisongo Semarang Tahun 2018.

Untuk melihat tingkat keefektifan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) di UIN Walisongo Semarang, formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

Kemudian hasil dari perhitungan dengan rumus diatas, akan ditentukan seberapa efektif kebijakan kinerja PNBP di UIN Walisongo tersebut dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri meliputi:

- a. Hasil yang diperoleh berada diantara $< 60\%$ = tidak efektif
 - b. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 60\% - 80\%$ = cukup efektif
 - c. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 80\% - 100\%$ = efektif
 - d. Hasil yang diperoleh berada diantara $> 100\%$ = sangat efektif
- (Budi & Handayani, 2019)

Hasil Perhitungan Tingkat Keefektifan Kebijakan Kinerja PNBP di UIN Walisongo per Departemen.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2018 tingkat realisasi penerimaannya sebesar 157%, melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan perolehan persentase keefektifan lebih dari 100%, berdasarkan standarisasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UIN Walisongo sangat efektif. Hasil Tabel diatas merupakan rekapitulasi total efektivitas Kinerja PNBP UIN Walisongo tahun 2018 yang dihitung secara total dari keseluruhan realisasi perbulannya.

Pembahasan

Dijelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai Intellectual Capital yang melaksanakan proses realisasi penerimaan PNBP harus memastikan pendapatan atas kegiatan layanan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di masing-masing departemen. Pelaksana mengorganisir dan merekap penerimaan PNBP harian dan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada atasan di masing-masing departemen dan fakultas, yaitu Ketua dibagian keuangan masing-masing departemen dan fakultas. Dalam penyusunan pelaporan PNBP ini sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam peraturan tersebut disebutkan sumber daya manusia sebagai pelaksana harus memastikan jenis kegiatan yang dapat dibayarkan dengan jumlah dan nilai yang sudah diperhitungkan, kemudian dibuatkan pengajuan pembayaran kegiatan PNBP yang dibuktikan dengan daftar nominatif jumlah bidang yang sudah selesai dan berita acara penyelesaian pekerjaan oleh Seksi teknis. Setelah itu bendahara pengeluaran akan membuat bukti pembayaran berupa kuitansi untuk belanja barang dan daftar honor untuk kegiatan PNBP tersebut (Hartono, Kinerja Intellectual Capital di UIN Walisongo, 2020).

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama satu tahun anggaran, yang pada akhirnya akan membetuk laporan realisasi anggaran dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan PNBP pada UIN Walisongo Semarang. Dari pengungkapan hasil realisasi dan tingkat efektivitas PNBP UIN Walisongo tahun 2018 yang telah didapatkan sebelumnya, terhitung UIN Walisongo berhasil mendapatkan total realisasi pendapatan sebesar Rp. 76.946.297.423,20 melebihi target awal

pendapatan PNBP yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 48.859.000.000,00. UIN Walisongo juga memiliki tingkat kinerja PNBP sebesar 157% yang apabila disesuaikan dengan standarisasi Departemen Dalam Negeri, UIN Walisongo memiliki kinerja PNBP yang sangat efektif. Kedua hasil realisasi dan tingkat efektivitas yang telah didapatkan tersebut, menunjukkan bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia sebagai Intellectual Capital yang dimiliki oleh UIN Walisongo telah berhasil melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan kinerja dan tanggung jawab yang sangat baik, sehingga realisasi penerimaan PNBP yang didapatkan sampai melampaui target yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing departemen di UIN Walisongo Semarang.

Kesimpulan

Sistem penetapan target anggaran PNBP di UIN Walisongo menggunakan sistem penetapan anggaran secara partisipatif, dikarenakan dalam penetapan anggaran, karyawan, staff, dan dosen sebagai SDM pelaksana ikut terlibat dalam penetapan anggaran tersebut. Di UIN Walisongo penetapan target anggaran awal untuk keseluruhan layanan yang dimiliki oleh UIN Walisongo dilakukan oleh pihak rektorat sebagai otoritas teratas. Hasil penetapan target yang telah ditetapkan kemudian diberikan kepada 18 unit departemen yang dimiliki oleh UIN Walisongo termasuk fakultas pendididkan perkuliahannya untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen dan fakultas di UIN Walisongo. Kemudian memberikan kembali rancangan target anggaran PNBP dari masing-masing departemen kepada Rektorat untuk disetujui.

Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai salah satu bagian dari

Intellectual Capital memiliki peran penting dalam menetapkan target anggaran PNBPN di UIN Walisongo Semarang. Karyawan, staff, dan dosen sebagai SDM yang terdapat dalam 18 departemen di UIN Walisongo menetapkan target dengan melihat kebutuhan tiap departemennya. Target anggaran yang dibuat harus bersifat spesifik, atau dalam artian harus secara rinci dan mendetail sehingga dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai di tiap-tiap departemen UIN Walisongo Semarang. Target tersebut kemudian harus disusun dan dicantumkan berupa angka, volume, rupiah, dan persentase agar tercipta sebuah rancangan anggaran PNBPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menentukan target anggaran PNBPN dari masing masing departemen, SDM, dalam hal ini staff, karyawan, dan dosen selaku pelaksana perencanaan didukung dengan kemampuan kognitif yang mumpuni dan akuntabilitas yang terjamin.

Daftar Pustaka

- Budi, R., & Handayani, N. (2019). Pengendalian Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Volume VI Jember: e-Journal Universitas Jember, 100.
- Dewi, C. P. (2011). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2007-2009. 2011, p. 54.
- Fatimah, N. (2020). Pengertian Ruang Lingkup, Manfaat dan Contohnya. Retrieved from <https://pelayananpublik.id/2019/09/12/pengertian-ruang-lingkup-manfaat-dan-contohnya/>

- Ferlinda, E. D., Ribawanto, H., & Siswidiyanto. (n.d.). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Pada PT. Telkom Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 22-30.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hartono, S. B. (2020). Kinerja Intellectual Capital di UIN Walisongo. (A. F. Hairuddin, Interviewer)
- Hartono, S. B. (2020). PNBP di Universitas. (A. F. Hairuddin, Interviewer)
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Moleong, L. J. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- M.Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.
- Nursanti, Mas'ud, M., & Alam, N. (2019). Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Study Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2015–2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vo. 2 No. 4, 98-99.
- Rittiauw, S. A. (2019). Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dalam Perspektif Pelayanan Kepelabuhan. 2019, p. 50.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Unknown. (2020). Data Primer dan Data Sekunder. Retrieved from <http://sosiologis.com/data-primer-dan-datasekunder>
- Warno. (2020). Sistem Penetapan Anggaran PNBPN di UIN Walisongo. (A. F. Hairuddin, Interviewer)
- Winastiti, D. Y. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. p. 425.